

## **RESPON FLUKTUASI TINGKAT UPAH TERHADAP PERUBAHAN TINGKAT PENGANGGURAN DI INDONESIA**

**Edwin Basmar**  
Universitas Fajar  
Email : [e2nbm@yahoo.com](mailto:e2nbm@yahoo.com)

**Rachmat Sugeng**  
Universitas Fajar  
Email : [rachmatsugeng@gmail.com](mailto:rachmatsugeng@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengurai penyebab perubahan struktur keuangan di Indonesia melalui kebijakan tingkat upah yang berdampak pada tingkat pengangguran, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Metode pengukuran dilakukan dengan mengelolah data statistik yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Bank Sentral Indonesia, menggunakan alat analisis SPSS versi 23, data tersebut disajikan secara time series secara kuartalan dari tahun 2009 hingga 2019. Adapun hasil yang ditemukan adalah *pertama* untuk priode jangka pendek hubungan antara tingkat upah terhadap pengangguran positif signifikan, dimana ketika kebijakan tingkat upah rendah maka potensi pengangguran akan meningkat, *kedua* untuk periode jangka panjang hubungan antara tingkat upah terhadap potensi pengangguran positif signifikan, ketika kebijakan tingkat upah tinggi maka potensi pengangguran juga meningkat di Indonesia.

**Kata-kata Kunci** : *Upah, Pengangguran, Fluktuasi Keuangan, Krisis Keuangan Dan Stabilitas Keuangan*

### **PENDAHULUAN**

Pengangguran merupakan suatu masalah yang dapat merusak perekonomian suatu negara, oleh karena itu diperlukan kebijakan yang dapat mengurangi peningkatan jumlah pengangguran tersebut<sup>1,2</sup>. Selain itu pengangguran juga dapat memberikan pengaruh pada tingkat kemiskinan, kondisi ini akan mempengaruhi fluktuasi keuangan<sup>3</sup>, baik dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang<sup>4,5</sup>, tingginya tingkat pengangguran menimbulkan biaya yang cukup tinggi, ditandai dengan meningkatnya beban sosial yang dicanangkan oleh negara untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia. Salah satu negara yang memiliki pengangguraan yang cukup tinggi adalah Amerika<sup>6</sup>, yang secara tidak langsung pengangguran telah menyebabkan terjadinya krisis keuangan yang dikenal dengan nama *Suprime Mortgage*<sup>7</sup>. Pemerintah Amerika memberikan kredit kepada para nasabah yang tidak memiliki

kemampuan dalam melunasi tunggakan pinjamannya<sup>8</sup>, hal ini mengakibatkan perbankan mengalami kesulitan keuangan yang cukup berat<sup>9</sup>, dan berimbas pada perekonomian secara global.

Akibat dari meningkatnya jumlah pengangguran ini, maka dapat terjadi kemunduran perekonomian di suatu negara<sup>10,11</sup> dan akan berdampak negatif jika pengangguran tidak ditangani dengan baik<sup>12,13</sup>, sehingga untuk priode jangka panjang akan meningkatkan tingkat kemiskinan secara tidak langsung<sup>14</sup>. Pengangguran yang tidak mendapatkan penghasilan tetap, perlahan akan menjadi kaum sosial yang miskin<sup>15</sup>, dimana kemiskinan ini juga merupakan suatu fenomena ekonomi yang harus dicarikan solusi yang tepat, seperti membuka lapangan pekerjaan yang mencukupi bagi para pencari pekerjaan yang masih produktif<sup>16</sup> agar semua penyakit perekonomian dapat teratasi<sup>18</sup>.

Tingginya pengangguran sekitar 6.87 juta jiwa memberikan pengaruh pada tingkat kejahatan di masyarakat<sup>19,20</sup>, hal ini dilakukan oleh para pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dilakukan dengan melakukan kejahatan<sup>21</sup>, pola tersebut memberikan pengaruh sosial bagi masyarakat secara umum dan menimbulkan bencana sosial secara khusus.

Kondisi tersebut sangat kontroversial, terlihat dari penanganan pengangguran dengan memberikan bantuan yang sifatnya sementara oleh departemen social, sehingga ini tidak menyelesaikan akar masalah, akhirnya tingkat pengangguran tetap meningkat di Indonesia, kebijakan yang diberikan pemerintah dilakukan dengan pemberian kesehatan gratis, pendidikan, beras miskin dan subsidi rumah murah hal ini dilakukan agar pengangguran dan kemiskinan dapat berusaha untuk mandiri dengan mengembangkan usaha atau bisnisnya sendiri<sup>22,23</sup>. Kebijakan lainnya yaitu dengan tingkat Upah Minimum Regional yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat<sup>24,25</sup>.

Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terhadap masyarakat, maka kebijakan tersebut harus di uji untuk mengetahui hasil kebijakan jangka panjang ataupun jangka pendek<sup>26</sup>. Fenomena rill atas pengangguran ini dilihat melalui banyaknya jumlah gelandangan, pengemis, dan pengamen bagai gunung es yang tidak dapat terselesaikan<sup>27</sup>, sehingga dengan penelitian ini dapat diketahui perubahan potensi pengangguran melalui rangsangan tingkat upah yang ditetapkan pemerintah.

Peneliti tertarik untuk mengetahui dampak rangsangan tingkat upah terhadap pengaruhnya pada potensi pengangguran, baik dalam jangka pendek dan jangka panjang, dengan tujuan agar hasil yang diperoleh nantinya memberikan kekuatan pada struktur keuangan negara di Indonesia, dimana untuk priode jangka pendek diharapkan dapat tercipta pemerataan pendapatan masyarakat yang adil, yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sementara untuk jangka panjang diharapkan dapat menjaga stabilitas keuangan dan menjadi antithesis krisis keuangan di Indonesia.

## KAJIAN PUSTAKA

Nilai upah memberikan peranan penting terciptanya pengangguran yang tinggi disuatu negara, hal ini dikarenakan besar kecilnya nilai upah yang diberikan akan berdampak pada kepuasan yang dirasakan pekerja, sehingga dengan ukuran tersebut tingkat pengangguran dapat berubah-ubah dan sangat berfluktuasi, Oleh karena itu upah dan pengangguran tidak terlepas satu dengan lainnya karena dampak yang ditimbulkan dapat mempengaruhi jalannya roda perekonomian, pandangan ini telah sesuai dengan teori upah dan pengangguran yang diungkapkan oleh Devid Ricardo dan Karl Marx. Hukum kesimbangan pasar terhadap petensi pengangguran dijelaskan bahwa untuk mencapai tingkat keseimbangan antara tingkat upah dan jumlah tenaga kerja berlaku hukum permintaan dan penawaran tenaga kerja, efektifitas hukum ini akan berjalan ketika tingkat upah meningkat maka titik ekuilibriumnya tercapai jika permintaan tenaga kerja bagi perusahaan akan menjadi sedikit atau kurang, hal ini mengakibatkan terjadi pengangguran yang tinggi, demikian pula sebaliknya tingkat pengangguran akan berkurang ketika tingkat upah diturunkan, maka permintaan tenaga kerja bagi perusahaan akan meningkat, sementara tingkat penawaran akan berkurang, sehingga para tenaga kerja mendapatkan tempat di perusahaan dan mengakibatkan jumlah pengangguran semakin berkurang.

Sejalan dengan pandangan teori Neo Klasik yang melihat bahwa pengangguran akan meningkat manakala upah yang ditawarkan ke pasar tenaga kerja meningkat, mengakibatkan permintaan atas tenaga kerja akan menurun atau dapat dikatakan bahwa perusahaan akan mengurangi jumlah karyawannya yang ada (Pemutusan Hubungan Kerja) dalam upaya mengatasi peningkatan jumlah upah yang ditawarkan, demikian pula sebaliknya ketika terjadi penurunan tingkat upah maka akan mengakibatkan jumlah tenaga kerja dapat terserap dengan maksimal.

Teori hukum permintaan dan penawaran juga menjelaskan bahwa ketika pengusaha dalam menciptakan barang dan jasanya banyak menggunakan tehnologi yang tinggi maka akan mengakibatkan permintaan akan tenaga kerja menurun, sehingga dampak dari penggunaan tehnologi ini mengakibatkan terjadinya pengangguran juga meningkat.

Secara teori pengangguran dapat terjadi dikarenakan banyak faktor, misalnya saja pengusaha dalam memproduksi suatu barang memerlukan biaya yang cukup besar, maka kemungkinan pengusaha tersebut akan mengurangi para tenaga kerjanya untuk tetap melanjutkan jalannya operasi perusahaan, sehingga dampak dari pengurangan tenaga kerja ini mengakibatkan pertumbuhan pengangguran semakin tinggi.

Teori tingkat kebutuhan menjelaskan bahwa ketika lapangan pekerjaan yang juga bersedia menampung tenaga kerja yang banyak dengan penghasilan yang rendah, juga merupakan salah satu penyebab terjadinya tingkat pengangguran yang tinggi, hal ini dikarenakan bahwa dengan kemampuan skill yang tinggi dengan tingkat upah yang rendah tidak memberikan kepuasan atas upah yang diperoleh.

Disisi lain tingginya tingkat upah yang juga ditawarkan kepada para tenaga kerja, biasanya menuntut keahlian yang terkadang tidak dapat dipenuhi oleh para

pencari tenaga kerja lainnya, sehingga hal ini juga memberikan pengaruh pada bertambahnya pengangguran yang menjadi sulit untuk di kendalikan.

Pengangguran terjadi pula ketika biaya produksi perusahaan terus meningkat yang diakibatkan oleh adanya kondisi perekonomian yang kurang mendukung, sehingga memberikan dampak pada faktor penjualan yang semakin berkurang, efek penjualan dan permintaan pasar yang berkurang tersebut mengakibatkan perusahaan harus menanggung beban produksi yang cukup besar, sehingga untuk menyelesaikan keadaan tersebut perusahaan harus melakukan pemutusan hubungan kerja, guna menutupi besaran biaya yang ditanggung oleh perusahaan. Kondisi ini memberikan dampak pada volume pengangguran di suatu negara terus meningkat.

Teori hukum Okun's Law menjelaskan bahwa pengangguran dapat memberikan pengaruh pada pergerakan pertumbuhan ekonomi suatu negara, dimana terdapat hubungan yang negatif antara pengangguran dengan tingkat pertumbuhan ekonomi negara karena dengan penambahan jumlah pengangguran yang banyak maka Negara akan mengganggu beban yang cukup besar, terkait dengan penetapan kebijakan yang tepat seperti peluang terhadap lapangan pekerjaan yang harus disediakan maupun skill yang harus dipersiapkan. Karena kemampuan yang dimiliki oleh para tenaga kerja merupakan potensi investasi yang dapat mendatangkan keuntungan bagi negara, sehingga dengan tingkat skill yang diukur sebagai investasi tersebut akan menjadikan pendapatan secara nasional yang nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

## **METODOLOGI**

Pengukuran tingkat upah terhadap potensi pengangguran di Indonesia, dilakukan dengan mengklasifikasikan tingkat upah, dari data tingkat Upah Minimum Regional setiap propinsi di Indonesia, mulai dari tahun 2009 hingga tahun 2019 secara *time series*. Nilai tersebut kemudian dijumlahkan secara keseluruhan setiap propinsi, lalu kemudian dirata-ratakan dan disajikan dalam bentuk kuartalan, adapun satuan dalam pengukuran ini menggunakan nilai rupiah.

Pengukuran tingkat pengangguran diukur dengan mengumpulkan data secara *time series* dari tahun 2009 hingga tahun 2019, nilai yang dikumpulkan merupakan persentase jumlah pengangguran dari tahun ke tahun selama periode penelitian, kemudian data tersebut dijumlahkan dan dirata-ratakan dengan mengklasifikasikan secara kuartalan, adapun satuan pengukuran variabel pengangguran ini adalah persen.

Selanjutnya kedua variabel tersebut, baik variabel independen yaitu tingkat upah, maupun variabel dependen yaitu tingkat pengangguran, akan dianalisis dengan regresi sederhana, menggunakan program SPSS versi 23, dan selanjutnya akan diukur potensi tingkat kecenderungan pengangguran dengan berdasarkan tingkat upah yang ditetapkan dalam kebijakan pemerintah.

Kedua variabel tersebut digambarkan secara statistik melalui hubungan fungsi regresinya seperti berikut ini :

$$Y = \alpha + \beta X + \mu$$

Dimana, X merupakan variabel tingkat Upah Minimum Regional di Indonesia, dan variabel Y adalah potensi pengangguran di Indonesia, dimana variabel ini merupakan variabel yang ingin dicapai yaitu untuk melihat potensi terjadinya peningkatan jumlah pengangguran. Nilai  $\alpha$  merupakan nilai konstanta, sementara  $\beta$  merupakan parameter variabel yang diukur, dan  $\mu$  adalah *random error*.

## HASIL PENELITIAN

Tingkat Pengangguran di Indonesia telah sesuai dengan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, dimana setiap peningkatan pengangguran terjadi karena penurunan tingkat upah yang menimbulkan kekosongan lapangan pekerjaan di pasar tenaga kerja.

Upah merupakan detektor utama terhadap gejala kebutuhan tenaga kerja di pasar tenaga kerja, karena kontrol terhadap potensi pengangguran dapat diatur *supply* dan *demandnya* pasar tenaga kerja melalui kebijakan tingkat upah di Indonesia.

Kebijakan yang tepat diukur melalui sinergi antara kebijakan tingkat upah dan pengangguran yang terkontrol, oleh karena itu untuk mengetahui besaran pengaruh dan tingkat signifikansi variabel yang menjadi ukuran penelitian ini, ditampilkan pada Tabel 1, dimana hasil tersebut akan digunakan untuk menjawab hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya.

**Tabel 1**  
Nilai Koefisien dan Signifikansi Variabel Penelitian

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-14,705	5,607		-2,623	,012
Upah	,002	,000	,519	3,940	,000

a. Dependent Variable: Pengangguran

Berdasarkan Tabel 1 diatas, terlihat bahwa nilai konstanta ( $\alpha$ ) sebesar - 14.705 dengan koefisien regresi  $\beta = 0.002$  (Upah). Untuk memudahkan pengukuran hubungan keduanya maka dapat digambarkan secara statistik dalam persamaan regresi sederhana sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta X$$
$$Y = - 14.705 + 0.002 X$$

Berdasarkan formula tersebut dapat dikatakan bahwa apabila tingkat upah dianggap konstan maka jumlah pengangguran akan bernilai sebesar - 14.705, dan apabila tingkat Upah ditingkatkan sebesar Rp 1 maka tingkat pengangguran mengalami peningkatan sebesar 0.002 persen.

Pengaruh variabel tingkat Upah terhadap potensi Pengangguran di Indonesia dapat dilihat dengan menggunakan uji t, dimana variabel Upah memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap perubahan tingkat

Pengangguran yang terjadi di Indonesia yaitu (0.000) dengan standar tingkat signifikansi (0.050).

Secara keseluruhan melalui Tabel 1 diatas dapat dikatakan bahwa, baik jangka pendek maupun jangka panjang, menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat upah terhadap potensi pengangguran di Indonesia. Kondisi tersebut menandakan bahwa dengan peningkatan tingkat upah sebesar Rp 1 akan menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia sebesar 0,002 persen.

Hasil temuan tersebut, secara keseluruhan memberikan pengaruh terhadap potensi pengangguran di Indonesia, namun besaran pengaruhnya pada priode jangka pendek dan jangka panjang tersebut masih terdapat perbedaan, hal ini ditandai dengan respon potensi gangguan terhadap tingkat upah di Indonesia.

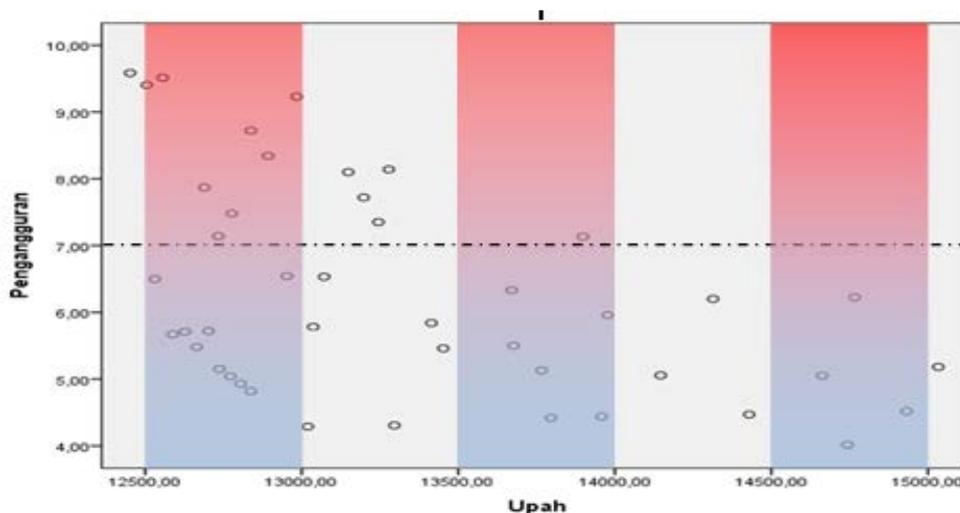
Respon yang terjadi pada kedua variabel tersebut cukup berbeda, hal ini ditunjukkan melalui perbandingan tingkat upah dengan jumlah pengangguran pada priode jangka pendek maupun priode jangka panjang. Kondisi tersebut akan memberikan gambaran pengaruh potensi pengangguran dan dampak yang diitmbulkannya akan dibahas pada Pembahasan Penelitian secara lebih seksama.

## PEMBAHASAN

### 1. Tingkat Upah dan Respon Tingkat Pengangguran Jangka Pendek.

Hasil penelitian yang dilakukan dengan nilai regresi tersebut, menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara tingkat upah terhadap potensi pengangguran yang ditandai dengan signifikansi sebesar 0.000.

Pengukuran tingkat upah terhadap potensi pengangguran pada periode jangka pendek ini, terdapat perbedaan melalui pola sebarannya di level-level tertentu, hal ini menunjukkan bahwa pada level tingkat upah tertentu akan memberikan pengaruh maksimal terhadap pengangguran, ditandai dengan sebaran titik-titik potensial terjadinya tingkat pengangguran, demikian pula sebaliknya, dimana tingkat upah cenderung tidak berdampak terhadap potensial pengangguran di Indonesia, hal ini dapat dilihat pada gambar berikut ini :



**Gambar 1**  
**Hubungan Tingkat Upah dan Potensi Pengangguran Jangka Pendek**

Sumber : Hasil Olah Data

Keterangan : Zona Merah merupakan zona kritis potensi pengangguran, Zona Biru merupakan zona normal potensi pengangguran

Melalui hasil regresi pada Tabel 1, menunjukkan bahwa hasil penelitian untuk jangka pendek ditemukan bahwa dengan tingkat upah yang lebih rendah maka potensi pengangguran cukup tinggi, demikian pula sebaliknya ketika tingkat upah ditingkatkan maka potensi tingkat pengangguran cukup rendah, sementara kondisi tersebut ditandai dengan sebaran titik-titik tingkat pengangguran pada level tingkat upah yang ditetapkan dalam kebijakan pemerintah seperti tampak pada Gambar 1.

Gambar 1 tersebut terlihat bahwa tingkat upah berskala kecil yaitu antara Rp 1.200.000 hingga Rp 1.300.000, menunjukkan bahwa untuk kondisi normal terdapat 10 titik potensi pengangguran di Indonesia (zona biru), sementara untuk kondisi kritis terdapat 9 titik potensi terjadinya pengangguran di Indonesia (zona merah).

Tingkat upah yang berskala antara Rp 1.300.000 hingga Rp 1.350.000, menunjukkan bahwa jika perekonomian berjalan lancar, maka terdapat 6 titik potensi pengangguran di Indonesia, sementara untuk kondisi kritis terdapat 4 titik potensi terjadinya pengangguran di Indonesia.

Potensi pengangguran yang terjadi ditingkat upah yang berskala antara Rp1.350.000 hingga Rp 1.400.000, menunjukkan bahwa jika perekonomian berjalan lancar maka terdapat 6 titik potensi pengangguran di Indonesia, sementara untuk kondisi kritis terdapat 1 titik potensi terjadinya pengangguran di Indonesia.

Kondisi tingkat upah pada skala antara Rp 1.400.000 hingga Rp 1.450.000, menunjukkan bahwa, jika perekonomian berjalan lancar maka terdapat 3 titik potensi pengangguran di Indonesia, sementara untuk kondisi kritis terdapat tidak terdapat potensi pengangguran di Indonesia.

Posisi tingkat upah yang berada pada skala antara Rp 1.450.000 hingga Rp 1.500.000, menunjukkan bahwa, jika perekonomian berjalan lancar maka terdapat 4 titik potensi tingkat pengangguran di Indonesia, sementara untuk kondisi kritis tidak ditemukan adanya potensi pengangguran di level tersebut.

Pebandingan antara potensi pengangguran terhadap perubahan tingkat upah pada priode jangka pendek ini menunjukkan bahwa *pertama*, untuk kondisi perekonomian normal (zona biru), respon terjadi melalui sebaran titik-titik yang merata di setiap level kebijakan tingkat upah, sementara untuk zona merah terlihat bahwa potensi pengangguran akan cenderung menurun, manakala tingkat upah yang ditawarkan meningkat, hal ini ditandai dengan berkurangnya titik potensi pengangguran pada tingkat upah yang tinggi.

Besaran potensi pengangguran yang dapat merangsang terjadinya dampak ekonomi yang cukup berat, terlihat melalui titik-titik yang berada dalam zona merah, ini menandakan bahwa, ketika pemerintah menetapkan tingkat upah yang rendah potensi pengangguran meningkat, oleh karena itu akan memberikan pengaruh sangat besar pada perekonomian, hal ini dapat mengakibatkan bertambahnya beban sosial masyarakat ditandai dengan besaran pengangguran yang terjadi dipriode tersebut, dibalik jumlah pengangguran yang tinggi terdapat biaya yang akan ditanggung oleh pemerintah, hal ini akan berdampak pula pada beberapa aspek-aspek non ekonomi lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja akan merespon positif jika pemerintah menetapkan kebijakan upah yang rendah, hal ini telah sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Campbell C (2014) yang menyatakan bahwa tingkat upah yang rendah tidak memberikan dampak yang baik bagi setiap tenaga kerja, yang diukur melalui kepuasan yang diperoleh dari jumlah pendapatannya.

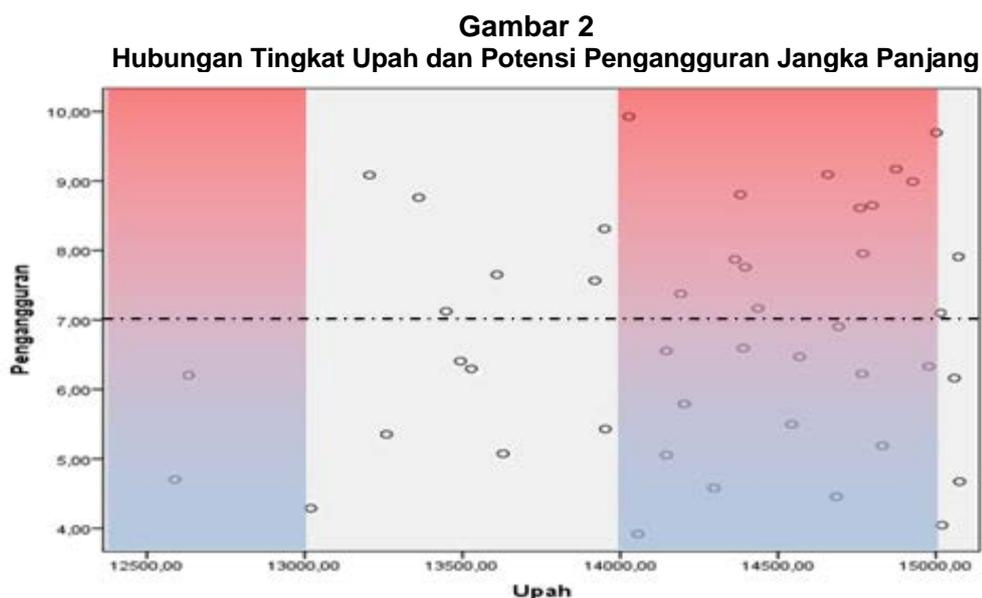
Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan teori Karl Marx yang melihat bahwa output akan maksimal ketika tingkat upah mampu memberikan kesejahteraan kepada para tenaga kerja.

Implikasi penelitian ini memperlihatkan bahwa kebijakan upah menjadi perhatian penting bagi pemerintah, hal ini dikarenakan penggunaan sumber daya manusia yang maksimal harus di barengi dengan pendapatan yang maksimal pula, karena jika tidak diterapkan maka potensi pengangguran berupa banyaknya gelandangan dan pengemis dapat berakibat pada terjadinya tingkat kekerasan di masyarakat, semuanya itu menjadi bayang-bayang pemerintah untuk dapat mengurangi tingkat pengangguran dalam jangka waktu yang pendek.

## 2. Tingkat Upah dan Respon Tingkat Pengangguran Jangka Panjang.

Penelitian tingkat upah terhadap respon tingkat pengangguran untuk jangka panjang menunjukkan hasil nilai regresi yang berpengaruh positif signifikan ditandai dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000.

Pengukuran tingkat upah terhadap potensi pengangguran pada periode jangka panjang ini, terlihat melalui pola sebaran di beberapa level tertentu, khususnya pada tingkat upah yang tinggi memberikan pengaruh maksimal terhadap potensi pengangguran melalui sebaran titik-titik potensial pengangguran, demikian pula sebaliknya dimana tingkat upah yang rendah maka kecenderungan potensi pengangguran tidak terlihat, untuk lebih memahami kondisi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Sumber : Hasil Olah Data

*Keterangan : Zona Merah merupakan zona kritis potensi pengangguran, Zona Biru merupakan zona normal potensi pengangguran*

Tampak pada Tabel 1 diatas, hasil penelitian untuk jangka panjang ditemukan bahwa dengan tingkat upah yang rendah, maka kondisi tersebut tidak terdapat potensi pengangguran, demikian pula sebaliknya ketika tingkat upah yang tinggi, maka akan terjadi potensi pengangguran yang tinggi di Indonesia, sementara kondisi tersebut ditandai dengan sebaran titik titik potensi pengangguran pada level tingkat upah yang telah ditetapkan pemerintah seperti yang tampak pada gambar 2.

Gambar 2 tersebut terlihat bahwa tingkat upah dengan skala kecil yaitu antara Rp 1.200.000 hingga Rp 1.300.000, menunjukkan bahwa pada kondisi normal terdapat 2 titik potensi pengangguran di Indonesia (zona biru), sementara untuk kondisi kritis tidak terdapat potensi pengangguran di Indonesia (zona merah).

Tingkat upah yang berskala antara Rp 1.300.000 hingga Rp 1.400.000, menunjukkan bahwa jika perekonomian berjalan lancar maka terdapat 6 titik potensi pengangguran di Indonesia, sementara untuk kondisi kritis juga terdapat 6 titik potensi terjadinya pengangguran di Indonesia.

Potensi pengangguran yang terjadi ditingkat upah skala antara Rp 1.400.000 hingga Rp 1.500.000, menunjukkan bahwa jika perekonomian berjalan lancar maka terdapat 16 titik potensi pengangguran di Indonesia (zona biru), sementara untuk kondisi kritis terdapat 15 titik potensi terjadinya pengangguran di Indonesia (zona merah).

Konsentrasi kebijakan upah dalam kaitannya terhadap potensi pengangguran di priode jangka panjang ini menunjukkan adanya perbedaan yaitu pada kondisi perekonomian normal (zona biru), yang sebaran titik yang tidak merata disetiap kebijakan tingkat upah yang ditetapkan pemerintah, sementara untuk zona merah terlihat bahwa potensi pengangguran akan cenderung meningkat, manakala tingkat upah yang ditawarkan meningkat, hal ini ditandai dengan konsentrasi titik potensi pengangguran pada tingkat upah yang tinggi.

Pada periode jangka panjang ini dapat memberikan efek terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, hal ini didukung dengan potensi pengangguran yang cenderung meningkat pada zona merah, kecenderungan ini terjadi ketika tingkat upah mengalami peningkatan, ditandai dengan semakin rapat dan terkonsentrasi pada tingkat upah yang tinggi, oleh karena itu ketika kebijakan ini tidak ditangani dengan serius maka akan mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, demikian pula sebaliknya, ketika pemerintah memberikan kebijakan yang tepat terhadap tingkat upah maka potensi krisis ekonomi akan berkurang.

Hasil penelitian diperiode jangka panjang ini menunjukkan bahwa tenaga kerja telah memiliki kapasitas kemampuan yang tinggi sehingga layak untuk diberikan apresiasi berupa tingkat upah yang tinggi, namun kondisi tersebut berbanding terbalik dengan para pemberi kerja yang memilih menggunakan tenaga kerja mesin, sehingga ini membuktikan bahwa meski kebijakan upah yang tinggi tidak serta merta akan mengurangi potensi pengangguran di Indonesia.

Kondisi tersebut telah sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Basmar E (2015) yang menyatakan bahwa dengan penggunaan tehnologi yang tinggi dalam menjalankan operasional perusahaan maka potensi pengangguran akan tetap meningkat meskipun kebijakan tingkat upah dinaikkan.

Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan teori Keynes yang melihat bahwa kemampuan dalam mengurangi potensi pengangguran tidak hanya dengan menetapkan kebijakan tingkat upah yang tinggi, melainkan dengan masuknya teknologi maka potensi pengangguran di suatu Negara akan meningkat karena permintaan tenaga kerja yang rendah.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan upah bukan menjadi dasar utama dalam mengurangi pengangguran, sehingga penting bagi pemerintah, untuk mengantisipasi potensi pengangguran tersebut dengan mendorong agar penganggur dapat menciptakan lapangan kerja sendiri.

Ketika kebijakan tersebut tidak digalakkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan secara mandiri, maka potensi pengangguran akan terus meningkat, dan ketika kondisi ini semakin tidak tersentuh oleh pemerintah maka akan mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah kemiskinan dalam dampak jangka panjang akan mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi di masa yang akan datang.

## **SIMPULAN**

Potensi pengangguran melalui tingkat upah untuk jangka pendek menunjukkan pengaruh positif signifikan dimana jika tingkat upah yang rendah akan memberikan pengaruh pada meningkatnya potensi pengangguran, karena kemampuan pekerja tidak diapresiasi dengan baik melalui kebijakan pengupahan di Indonesia, yang akhirnya berimplikasi pada peningkatan jumlah gelandangan dan pengemis serta meningkatnya tingkat kekerasan pada sosial kemasyarakatan.

Priode Jangka panjang, terkait hubungan antara tingkat upah terhadap potensi pengangguran di Indonesia, menunjukkan pengaruh positif signifikan, dengan gejala bahwa potensi pengangguran tercipta dikala kebijakan tingkat upah ditingkatkan, hal ini dikarenakan penggunaan teknologi sehingga memberikan peluang terjadinya krisis ekonomi di Indonesia.

## **REFERENSI**

Blanchard Olivier and Jordi Gali., *A New Keynesian Model with Unemployment* Kiel Working Paper Collection No. 2 (2007).

Reiter Michael., *Embodied Technical Change and The Fluktuations of Wage and Unemployment*, Universitas Pompeu Febra, Department of Economics and Business Barcelona (2006).

Basmar E, ' Analisis Siklus Keuangan dan Krisis Keuangan di Indonesia' (Universitas Hasanuddin Makassar, 2018).

Hagedorn Marcus and Lourii Manivskii., *The Cyclical Behavior Equilibrium Unemployment And Vacancies Revisited*, Eropean Central Bank Working Paper Series (2008).

Elsby Michael W., Ryan Michaels, Gary Solon., *The Ins And Outs Of Cyclical Unemployment*, NBER Working Paper Series 2007.

Basmar E, Analisis Siklus Keuangan dan Krisis Keuangan di Indonesia (Universitas Hasanuddin Makassar, 2018).

Basmar E, *Pengaruh Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pasca Krisis Moneter di Indonesia*, Jurnal Manajemen Progresif Vol 5, 1 Agustus 2011 Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIM Nitro 2011.

Utari, G.A.D., Arimurti, T., dan Kurniati, I.N., '*Pertumbuhan Kredit Optimal*' (Publikasi Bank Indonesia, 2012).

Basmar E, *The Effect of Interest Rates on The Financial Cycle in Indonesia*, Advance in Economics, Business and Management Research, Vol 75 Atlantis Press 2018.

Basmar E, *Dampak Krisis Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, Jurnal Analisis Seri Ilmu-Ilmu Ekonomi, Vol 4 No 2 Desember 2015, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, 2015.

Hadad, M.D., '*Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Di Indonesia*' (Kuliah umum Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar 2015).

Braun Helge, Unemployment Dynamics The Case Monetary Policy Shocks, Northwestern University, 2005.

Gertler Mark, Antonella Trigari., *Unemployment Fluctuations With Staggered Nash Wage Bargaining*, NBER Working Paper Series 2006.

Deriantino, Elis, "Indonesia Financial Stability and Macroeconomic Development"(Bank Indonesia Research Paper2010).

Owens Mark F., John H. Kagel., *Minimum Wage Restrictions And Employee Effort In Incomplete Labor Markets An Experimental Investigation* Journal of Economic Behavior and Organization 73 (2010) 317-326 Elsevire.

Clar Miquel, Christian Dreger, and Raul Ramos., *Wage Flexibility And Labour Market Institutions*, IZA DP No. 2581, 2008.

Haefke Christian, Marcus Sonntag and Thijs Van Rens., *Wage Rigiditiy And Job Creation*, Barcelona GSE Working Paper Series, 2007.

Pascalau Razvan, Productivity Shocks, Unemployment Persistence And The Adjustment Of Real Wages MPRA Paper No 7222 (2008) .

Gerlach Knut and Gesine Stephan., *Wage Distributions By Wage Setting Regime*, IAB Discussion Paper No 9 2005.

Ross Stephen L., Are Shirking And Leisure Substitutable An Empirical Test Of Efficiency Wages Based On Urban Economic Theory Regional Science and Urban Economics 38 (2008) 498 – 517 Elsevire.

Kennan John., Private Information, Wage Bargaining, and Employment Fluctuations, NBER Working Paper Series (2006).

Basmar E, Marketing Performance In Improving Competitive Advantages of Macro Business South Sulawesi Province, *Advence in Economics, Business and Management Research*, Vol 75 Atlantis Press 2018.

Basmar E, Organization Culture, Competency, Leadership, OCB, Organizational Performance of BAPEDDA Province South Sulawesi, *Advence in Economics, Business and Management Research*, Vol 75 Atlantis Press 2018.

Campbell Carl M., Deriving The Wage–Wage And Price–Price Phillips Curves From A Model With Efficiency Wages And Imperfect Information *Economics Letters* 107 (2010) 242 – 245 Elsevire.

Campbell Carl M., Kunal S. Kamlani, *The Reasons For Wage Rigidity Evidence From A Survey of Firm* *Oxford Journal* (2014) Northern Illinois University.

Rudanko Leena., Labor Market Dynamics under Long Term Wage Contracting, Boston University (2008).

Altonji Joseph G. and Paul J. Devereux, *The Extent And Consequences Of Downward Nominal Wage Rigidity*, NBER Working Paper Series 1999.

Bank Indonesia, “*Laporan Tahunan 1989 - 2000*” Jakarta 2000.

Bank Indonesia, “Perkembangan Terkini dan Outlook Ekonomi” Jakarta 2014.

Bank Indonesia “*Kajian Stabilitas Keuangan*” No 23 September 2014, Jakarta 2014.

Bank Indonesia, “*Kajian Stabilitas Keuangan*” Jakarta 2017.

Badan Pusat Statistik, “*Indikator Ekonomi Desember 2014*” Jakarta 2014.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia ‘*Laporan Tim Kajian Pola Krisis Ekonomi*’ (Kementrian Keuangan Republik Indonesia Badan Kebijakan Fiskal Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Jakarta 2012).

Campbell Carl M., An Efficiency Wage Approach To Reconciling The Wage Curve And The Phillips Curve, *Jurnal Labor Economics* 15 (2008) 1388 – 1415 Elsevier.

Shimer Robert., *The Consequences Of Rigid Wages In Search Models*, NBER Working Paper Series (2004).